

Implementation of Responsibility Accounting in Verifying and Monitoring Reports of Responsibility Paying For Pension Paying From Partner Pays PT. Taspen (Persero) Manado Branch Office

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Memverifikasi dan Memonitoring Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun dari Mitra Bayar PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado

La Viola Mongdong¹, Hendrik Manossoh², Natalia Gerungai³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia
E-mail : violamongdong@gmail.com

ABSTRACT

Management Accounting acts as an accounting system in the form of information to be provided to the company's internal parties. In its role, management accounting tends to function as a measuring tool for company performance in their respective fields, which is then managed into company information and used as a tool for making decisions. The company's internal division makes responsibility accounting as an accounting system that is used to measure the performance of each manager to always play an active role in achieving goals properly. In a large company, it is necessary to have a responsibility accounting role so that it can be a benchmark for company development. the function of the responsibility accounting system is as a means of recording, reporting and monitoring. The accountability report is in the form of a document that contains a complete explanation of the implementation of an activity from the beginning to the end of a period. The purpose of this study was to determine the role of responsibility accounting in verifying and monitoring the pension payment accountability reports from paying partners of PT. Taspen (Persero) Manado Branch Office. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection methods through interviews, documentation and observation. The results show that accountability accounting has been going well, especially in the monthly accountability report

Keywords : Responsibility Accounting, Accountability Report

ABSTRAK

Akuntansi Manajemen berperan sebagai sistem akuntansi yang berbentuk informasi untuk diberikan kepada pihak internal perusahaan. Dalam perannya akuntansi manajemen cenderung berfungsi sebagai alat pengukur kinerja perusahaan dalam bidangnya masing-masing, yang kemudian di kelola menjadi sebuah informasi perusahaan dan dijadikan alat untuk mengambil keputusan. Bagian internal perusahaan menjadikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap manajer untuk selalu berperan aktif dalam mencapai tujuan dengan baik. Dalam suatu perusahaan besar diperlukan adanya peran akuntansi pertanggungjawaban sehingga dapat menjadi tolak ukur perkembangan perusahaan. fungsi dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai alat pencatatan, pelaporan dan pengawasan. Adapun laporan pertanggungjawaban berupa dokumen yang berisi penjelasan lengkap tentang pelaksanaan suatu kegiatan dari awal hingga akhir pada suatu periode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam memverifikasi dan memonitoring laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun dari mitra bayar PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik terlebih pada laporan pertanggungjawaban bulanan.

Kata kunci: Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 2 UU tersebut dinyatakan juga tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Selanjutnya dinyatakan pula tentang bentuk BUMN yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu (1) Perusahaan Perseroan (Persero); (2) Perusahaan Perseroan terbuka (Persero Terbuka); (3) Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

BUMN berperan sangat penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut adalah sebagai penghasil barang dan / atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Bentuk dari penyelenggara perekonomian tersebut adalah Badan Usaha Perseroan (Persero).

Salah satu jenis Badan Usaha Perseroan adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. PT Taspen (Persero) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi Negara di Indonesia atas peran dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Dengan adanya mitra bayar maka diharapkan mutu pelayanan PT. Taspen (Persero) akan semakin baik. Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan layanan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan jasa yang diberikan adalah terbaik. Dalam perkembangannya, hingga saat ini terdapat 11 (sebelas) mitra bayar PT Taspen (Persero) untuk menyalurkan dana pensiun yang melibatkan sejumlah proses pengumpulan data, pencatatan dan penyajian laporan atas penyaluran dana pensiun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan oleh PT Taspen (Persero).

Dalam proses tersebut akuntansi pertanggungjawaban menjadi suatu elemen yang sangat penting bagi organisasi untuk menilai laporan yang disajikan dalam mempertanggungjawabkan pencairan dana ke rekening penerima dana pensiun kepada manajer verifikasi SPJ. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Sebagai penyedia jasa PT. Taspen memiliki klien perseorangan, yang adalah pegawai negeri sipil serta mengabdikan kepada Negara sampai masa pensiunnya. Adapun produk dari PT. Taspen yang diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil berupa; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, dan

Program Jaminan Kematian (JKM). Dalam penelitian ini penulis ingin melihat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dari pembayaran produk dari PT. Taspen lewat mitra bayar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor: 388/MP/1960 ditetapkan tentang pentingnya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya ketika telah memasuki usia pensiun atau masa purna bakti.

Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk mengadakan evaluasi hasil kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan di waktu yang akan datang. Pembayaran pensiun yang dilakukan mitra bayar PT. Taspen dilakukan setiap hari serta evaluasinya pun dilakukan setiap hari menggunakan metode manual. Dalam rangka mencapai tujuannya maka semua pihak yang terkait berusaha untuk meningkatkan kinerja terlebih dalam melaporkan hasil evaluasi atau hasil yang terjadi di lapangan, untuk dijadikan pelajaran di periode berikutnya. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban yang dimaksud terdapat dalam proses pelaporan pertanggungjawaban pembayaran dan penyaluran dana pensiun lewat mitra bayar PT. Taspen.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyajian laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun dari mitra bayar dengan mengangkat judul: “PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MEMONITORING DAN MEMVERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN PENSUN DARI MITRA BAYAR PT. TASPEN(PERSERO) KANTOR CABANG MANADO”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan Rudianto (2010:10). James M Reeve, (2013:9) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.

Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen, LM Samryn (2001 : 258). Sistem akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulayadi Sc (2009:1999) yaitu :

- a. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban
- b. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.
- c. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran
- d. Manajer secara individu diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi

Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan tertentu. Setiap pusat pertanggungjawaban membutuhkan masukan yang berupa sejumlah bahan baku, tenaga kerja ataupun jasa- jasa yang akan diproses dalam pusat pertanggungjawaban. Hasil dari proses tersebut berupa keluaran yang terdiri dari produk dan jasa.

Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban berisi hasil – hasil yang dicapai oleh manajer dalam satu periode, kemudian hasil-hasil tersebut bertujuan menjadikan informasi bagi pimpinan untuk mengambil satu tindakan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun tujuan dari mengembangkan laporan pertanggungjawaban (Ikhsan 2009:58) adalah untuk :

- Mengizinkan manajemen puncak untuk mendelegasikan tanggungjawaban dan otoritas terhadap kepala departemen sehingga mereka dapat mencapai tujuan operasi departemen

- Menyediakan manajemen puncak dengan informasi terhadap akuntansi untuk mengukur kinerja dari setiap departemen dalam pencapaian tujuan dalam mencapai tujuan operasi

Program pensiun. Program pensiun merupakan program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa – jasa pegawai negeri selama bertahun – tahun bekerja dalam dinas pemerintah, untuk pembayaran secara nasional telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor: 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan surat Menteri Dalam Negeri nomor: 842.1-099 tanggal 12 february 1990, telah diatur tentang pembagian penugasan pembayaran pensiun di wilayah Indonesia dilakukan oleh PT. TASPEN (PERSERO).

3. METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media internet dan website resmi PT. Taspen (Persero). Dari hasil data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisa. Adapun proses analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, melakukan observasi pada objek penelitian, mengumpulkan data sekunder, melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data primer, kemudian dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif, setelah dilakukan analisis maka akan diperoleh hasil penelitian yang kemudian akan ditarik kesimpulan dan saran.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat orang informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dikantor PT. Taspen Cabang Manado, kemudian jawaban tersebut dalam bentuk kutipan tulisan hasil wawancara. Dapat diketahui bahwa penyaluran dana pensiun yang menjadi program PT. Taspen melalui mitra bayar merupakan langkah pemerintah untuk mensejahterakan aparatur sipil Negara (ASN) pada masa pensiun. Setiap penyaluran dana yang dilakukan harus melalui proses pengujian atas permintaan pembayaran yang kemudian ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang memberikan penerbitan perintah pembayaran.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam memverifikasi dan memonitoring laporan pertanggungjawaban mengacu pada lima indikator penunjang (Ikhsan 2009:58) tujuan laporan pertanggungjawaban yaitu:

1. Laporan harus sesuai dengan bagan organisasi
2. Bentuk laporan yang konsisten, cepat dan tepat waktu
3. Mudah di mengerti
4. Laporan harus terperinci namun tidak berlebihan
5. Laporan harus bersifat analisis

Yang kemudian dikembangkan sebagai laporan pertanggungjawaban mitra bayar dan laporan pertanggungjawaban kantor cabang sebagai tolak ukur kinerja karyawan dalam upaya pembayaran pensiun lewat mitra bayar. Sebelum pencairan dana dilakukan PT. Taspen mengajukan permohonan terlebih dahulu disertai dengan kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan pencairan dan pertanggungjawaban dana pensiun Bab III Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bentuk laporan yang di masukkan oleh mitra bayar yaitu berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) atas penyaluran dana yang dilakukan telah diberikan kepada yang berhak menerima dana pensiun dengan melampirkan bukti – bukti pemindahbukuan.

Apabila mitra bayar dalam kurun waktu tertentu memiliki garis

pertanggungjawaban yang tidak baik, pihak TASPEN mempunyai kewenangan untuk memberhentikan kerjasama (*punishment*). PT. TASPEN kantor Cabang Manado memiliki jadwal evaluasi yang telah di tetapkan untuk membahas laporan pertanggungjawaban berupa masuknya bukti pemindahbukuan dari setiap mitra bayar yang di rekap secara manual setiap harinya oleh staf bidang kas dan verifikasi SPJ PT. TASPEN kantor cabang Manado. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam proses pelaporan pertanggungjawaaban pembayaran pensiun dari mitra bayar berjalan setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam memverifikasi dan memonitoring laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun dari mitra bayar sudah berjalan dengan sangat baik setiap hari, hal tersebut diutarakan langsung oleh staf bidang kas dan verifikasi, yang secara langsung turun tangan dalam proses verifikasi dan monitoring laporan pertanggungjawaban tersebut setiap hari.

Proses pencairan dana pensiun dan laporan petanggungjawabannya sudah terlaksanakan dengan baik seturut dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 19/ PB/ 2015, tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana pensiun. Adapun alur pembayaran pensiun melalui mitra bayar yang telah ditetapkan oleh TASPEN adalah sebagai berikut;

- a. Mitra bayar yang dapat melakukan pembayaran pensiun adalah mitra bayar yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan TASPEN
- b. Penyaluran dana pensiun non-dapem dilakukan dengan cara:
 - H-1 pembayaran klim, kantor cabang TASPEN meminta dana dari Kantor Pusat (KP) TASPEN untuk pembayaran pensiun
 - Pada hari H, Divisi perbendaharaan Kantor Pusat (KP) TASPEN akan mengirimkan dana sesuai permintaan cabang ke rekening pensiun kantor cabang
 - Bidang kas membuat Bilyet Giro / Cek untuk melakukan penyaluran dana ke masing – masing mitra bayar sesuai dengan daftar pembayaran klim hari berkenaan
 - Bidang kas mengirimkan daftar pembayaran klim tersebut ke masing – masing mitra bayar
 - Mitra bayar wajib mengembalikan bukti pemindahbukuan ke TASPEN maksimal H+5 setelah dilakukan pemindahbukuan

Laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan oleh mitra bayar, terus diawasi dan terawasi oleh pihak TASPEN mulai dari manajer sampai Branch Manajer. Dalam pelaksanaannya penyaluran dana pensiun memiliki batasan waktu yaitu tanggal 1 setiap bulannya, atau sesuai tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam memverifikasi dan memonitoring laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun dari mitra bayar, yaitu struktur organisasi yang menjadi tolak ukur kinerja akuntansi pertanggungjawaban. Branch Manajer memberikan wewenang kepada manajer bidang kas dan verifikasi SPJ untuk pembagian tugas dan tanggungjawab kepada setiap staf kas dan verifikasi. Sehingga masing –masing mempunyai tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dengan benar Terdapat juga standar yang di tetapkan bidang Kas dan Verifikasi SPJ untuk setiap laporan yang diberikan pihak mitra bayar kepada TASPEN, yaitu

- a. Bukti pemindahbukuan harus jelas, mudah dipahami dan terbaca
- b. Tanggal validasi dalam setiap bukti pemindahbukuan harus jelas
- c. Setiap lembar bukti pemindahbukuan setiap mitra bayar paling lambat H+5 dari

tanggal penyaluran dana pensiun

Dalam melakukan pembayaran pensiun terhadap sedikit hambatan seperti rekening penerima pensiun sudah tutup sehingga tidak bisa menerima dana dari mitra bayar. Terhadap hal tersebut PT. Taspen memiliki solusi yaitu setiap mitra bayar yang menghadapi kendala tersebut mengembalikan uang ke rekening PT. Taspen dengan keterangan gagal pindah buku.

4.2. Pembahasan

Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam memverifikasi dan memonitoring laporan pertanggungjawaban pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado sudah berjalan dengan baik atau belum. Penulis melakukan perbandingan dengan teori yang dikemukakan oleh Arfan Ikhsan Lubis 2009 yaitu lima indikator laporan pertanggungjawaban dan perbandingan dengan tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana pensiun menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 19/ PB/ 2015.

1. Lima indikator laporan pertanggungjawaban

a. Laporan harus sesuai dengan bagan organisasi

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa dalam proses masuknya laporan pertanggungjawaban berupa surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dengan melampirkan bukti pemindahbukuan, bukti ini dimasukkan langsung oleh pihak mitra bayar ke bidang kas dan verifikasi SPJ kemudian di verifikasi oleh manajer bidang kas dan verifikasi dan hasilnya diberikan kepada Branch Manajer atau kepala cabang PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Manado sebagai bukti bahwa penyaluran dana pensiun sudah tersalurkan. Dari hasil wawancara hal tersebut sudah baik dilaksanakan setiap hari walaupun hanya secara manual tanpa menggunakan sistem

b. Bentuk laporan yang konsisten, cepat dan tepat waktu

Pada saat melakukan observasi bentuk laporan yang dimasukkan mitra bayar terpantau konsisten, tetapi untuk waktu dan ketepatan mengembalikan bukti pemindahbukuan PT. Taspen sudah menetapkan lima hari lamatnya setelah penyaluran dana pensiun dilakukan. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa mitra bayar yang belum tepat waktu mengembalikannya

c. Mudah dimengerti

Dari hasil wawancara, bentuk laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan terlihat mudah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Hal ini terus dipantau oleh bidang kas dan verifikasi SPJ guna menghindari kesalahan pada evaluasi mendatang

d. Laporan harus terperinci namun tidak berlebihan

Berikut ini merupakan format surat pertanggungjawaban mutlak

2010, No.593 10

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
218/PMK.02/2010 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENGABAIAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
PENSUN YANG MELAKSANAKAN
OLEH PT TASPEN (PERSERO)

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT PT TASPEN (PERSERO)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

- Atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: (4), tanggal..... (5), sejumlah Rp. (6) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
- Selaku penanggungjawab kegiatan, kami bertanggungjawab penuh atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun yang berhak;
- Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana APBN dibandingkan dengan pelaksanaan pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, kami bersedia untuk menyeter kelebihan dimaksud ke

Sumber: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2010/bn593-2010>

Untuk bukti pemindahbukuan berupa slip berwarna merah muda atau kuning yang didalamnya tertulis besaran rupiah yang diterima oleh pensiunan

e. Laporan harus bersifat analisis

Berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak dan lampiran bukti pemindahbukuan sudah terlihat jelas dan sangat terperinci. Hal tersebut didukung oleh penanggungjawab yang adalah kepala dari tiap mitra bayar.

2. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 19/ PB/ 2015 tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana pensiun

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap penyaluran dana pensiun oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado lewat sebelas mitra bayar berdasarkan peraturan tersebut terdapat Bab I Ketentuan Umum pasal 1, Bab IV Pembayaran Pensiun pasal 11 sampai dengan pasal 14, Bab V Pengelolaan saldo pasal 15 sampai dengan pasal 18, Bab VIII Pertanggungjawaban pembayaran pensiun pasal 24 sampai dengan pasal 26. Adapun hal yang belum sesuai dengan peraturan diatas, untuk itu pihak PT. Taspen (Persero) terus berupaya untuk mengadakan sistem otomatis harian yang bertujuan untuk merangkap bukti laporan pertanggungjawaban beserta lampirannya agar tidak terjadi kesalahan dalam perekapan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa; (1) atau pemindahbukuan hanya dilakukan secara manual setiap harinya dan belum menggunakan sistem seperti pada rekapan bulanan. (2) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam memverifikasi dan memonitoring laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun dari mitra bayar PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Republik Indonesia nomor per 19/PB/2015

5.2. Saran

Dalam pembahasan dari bab – bab sebelumnya penulis memberikan sedikit saran dengan maksud agar dapat bermanfaat kepada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Manado. Adapun saran – sarannya sebagai berikut :

1. PT. Taspen khususnya bidang kas dan verifikasi SPJ kiranya dapat memperbaharui sistem yang mengatur bentuk laporan pertanggungjawaban mitra bayar dan alangkah baiknya untuk mengadakan sistem otomatis harian guna kemudahan dalam merekap bukti pemindahbukuan harian.
2. Penulis tentu mengharapkan dikemudian hari penerapan akuntansi pertanggungjawab terus berpedoman pada peraturan- peraturan yang sudah ditetapkan
3. Besar harapan penulis agar diadakannya aplikasi yang dapat menjangkau semua pensiunan baik yang dekat dengan kantor cabang ataupun yang jauh dari kantor cabang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Irawan Setiyanto, N. (2017). *Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam*.
<https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5256>
- Anugrah, B. (2018). *Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya (studi kasus pada PT. SANUBARI MEGAH PERKASA JAMBI)*.
<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/627>
- Rudianto. (2010). *Akuntansi*.
- Rudianto. (2013). *pengertian akuntansi manajemen*.
- Badan Usaha Milik Negara. (2021). Retrieved Desember 2, 2021, from
<https://bumn.go.id/>:
- PT. TASPEN . (2021).
<https://www.taspen.co.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan PT TASPEN dan PT ASABRI. (2015)
- James M Reeve, d. (2013). *pengertian akuntansi*.
- Mowen, H. d. (2006). *pengertian akuntansi manajemen* .
- Arfan Ikhsan Lubis. 2009. *Akuntansi Keperilakuan Edisi.2*. Jakarta: Salemba Empat
- Samryn, L. (2001). *Akuntansi Pertanggungjawaban*.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PMK.05/2021
- Wijaya, R. B. (2019). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada PO Maju Lancar Yogyakarta*
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1138>
- Keputusan Menteri Pertama RI Nomor: 388/MP/1960 ditetapkan tentang pentingnya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya ketika telah memasuki usia pensiun atau masa purna bakti.
- Tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan Nomor 42/PMK.05/2021.
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf>. (n.d.).
 Indonesia, p. m. (2021).